

MODEL KOMUNIKASI BENCANA “TABLE TOP EXERCISE” DENGAN KOLABORASI MULTI PIHAK DALAM PEMULIHAN PASCABENCANA

Dwi Nugraheni^{1*}, Herlina Juni Risma Saragih¹, Kusuma¹, Rachmat Setiawibawa¹,
Anwar Kurniadi¹, Asep Supriatna²

¹ Program Studi Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan, Jakarta, Indonesia

² Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan SDA, BNPB, Jakarta, Indonesia
*dwinugraheni.bnpb@gmail.com

Diterima: 25 April 2025

Direvisi: 26 September 2025

Dipublikasikan: 25 Oktober 2025

ABSTRACT

This research aimed to discuss the disaster communication model through a table top exercise to analyse multi-stakeholder involvement in the implementation of post-disaster rehabilitation and reconstruction activities due to the earthquake in Cianjur in 2022. The disaster impact caused were casualties, damage to infrastructure and housing, as well as massive and significant social, economic and cross-sector losses. Effective disaster communication was a key factor in accelerating post-disaster rehabilitation and reconstruction efforts. This study used a descriptive qualitative method with data collection techniques through Focus Group Discussion (FGD), literature study, and direct observation. The results showed that pentahelix-based multi-stakeholder collaboration, involving the government, business world, academia, community, and media, was a strategic approach in disaster communication. Through the Table Top Exercise, stakeholders could collaborate, coordinate, share information, and play a role in post-disaster recovery. However, the efforts made had not been integrated and run optimally. This research recommended strengthening regulations and socialisation regarding the implementation of post-disaster rehabilitation and reconstruction through the preparation of R3P (Post-Disaster Rehabilitation and Reconstruction Plan) documents collaboratively involving multi-stakeholders, especially pentahelix elements. In addition, it recommended that the establishment of a multi-stakeholder coordination forum could increase the effectiveness of communication and synergy in sustainable post-disaster recovery.

Keywords: Communication; Collaboration; Post-Disaster Recovery; TTX.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan membahas model komunikasi bencana melalui table top exercise untuk menganalisis keterlibatan multipihak dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan pascabencana akibat gempa bumi di Cianjur tahun 2022. Dampak bencana yang ditimbulkan, adalah korban jiwa, kerusakan infrastruktur dan perumahan, serta kerugian sosial, ekonomi dan lintas sektor yang massif dan signifikan. Komunikasi bencana yang efektif menjadi faktor kunci dalam percepatan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui Focus Group Discussion (FGD), studi pustaka, dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi multipihak berbasis pentahelix, yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media, merupakan pendekatan strategis dalam komunikasi bencana. Melalui Table Top Exercise, para pemangku kepentingan dapat berkolaborasi, berkoordinasi, berbagi informasi, serta berperan dalam pemulihan pascabencana. Namun, upaya yang dilakukan belum terintegrasi dan berjalan optimal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan sosialisasi mengenai penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui penyusunan dokumen R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana) secara kolaboratif yang melibatkan multipihak, utamanya unsur pentahelix. Selain itu, direkomendasikan adanya pembentukan forum koordinasi multipihak dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dan sinergi dalam pemulihan pascabencana yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Komunikasi; Kolaborasi; Pemulihan Pascabencana; TTX.

A. PENDAHULUAN

Gempa bumi dengan kekuatan 5,6 magnitudo di Kabupaten Cianjur terjadi pada 21 November 2022. Bencana ini mengakibatkan 602 orang meninggal dunia, 5.593 orang mengalami luka berat dan 44 orang luka ringan, serta 166.927 orang terpaksa mengungsi, Dampak dari bencana tersebut bersifat *massif* yang menimbulkan kerusakan di sektor perumahan, infrastruktur sosial, ekonomi, dan lintas sektor (lingkungan hidup, pemerintahan, ketertiban dan keamanan, serta keuangan dan perbankan). Dalam dokumen R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana) disebutkan bahwa total nilai kerusakan dan kerugian sebesar Rp 4.551.780.766.613, - (Empat Trilyun Lima Ratus Lima Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah) (BPBD Cianjur, 2022).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dalam pasal 5 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Upaya tersebut perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh (BNPB, 2007). Bencana adalah urusan semua pihak. Oleh karena itu, pentahelix sebagai teknik kolaboratif atau multipihak dapat diterapkan sebagai strategi bersama antara pemerintah, lembaga usaha atau sektor swasta, komunitas atau masyarakat, akademisi, dan media untuk penanggulangan bencana dengan berbagi peran (Pasaribu, et al, 2023). Informasi tentang risiko bencana yang disampaikan oleh pemerintah tidak selalu diterima oleh masyarakat, sedangkan penanganan bencana perlu dilakukan secara cepat dan tepat. Hasil penelitian dari Firmansyah, Nurcahya, dan Mariany pada tahun 2023 menyebutkan bahwa penanganan bencana yang lambat, khususnya pada saat darurat dan pascabencana disebabkan lemahnya sumber daya manusia. Hal ini dapat diatasi salah satunya melalui koordinasi dan kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan. Hasil penelitian dari Dwiningtias dan Raharjo di Kabupaten Cianjur, menyatakan bahwa komunikasi bencana dalam penanganan gempabumi telah menunjukkan kemajuan, namun sistem komunikasi yang lebih efektif dan resposif masih perlu perbaikan dan pengembangan (Dwiningtias & Raharjo, 2024).

Salah satu model pelaksanaan komunikasi bencana adalah dengan *Table Top Exercise* (TTX) yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk berkoordinasi, berkomunikasi, dan memahami peran masing- masing dalam penanggulangan bencana baik saat tanggap darurat maupun di fase pemulihan pascabencana (Sari, et al, 2023). Teknik

pembelajaran berbasis simulasi khusus yang disebut *Table Top Exercise* dimaksudkan untuk menilai kecakapan dan kemampuan tim dalam merespons krisis. Latihan ini menawarkan kesempatan untuk bertukar pengetahuan dan mendapatkan wawasan dari pengalaman masa lalu. Sesuai dengan undang-undang keamanan siber nasional dan persyaratan terkait lainnya, *Table Top Exercise* juga membantu mengidentifikasi kontak antara pihak-pihak yang terlibat, memastikan aliran pesan yang benar, menilai kualitas pengambilan keputusan, dan mendukung proses pemulihan insiden (Putra & Fauzy 2024).

Model komunikasi bencana melalui pelatihan *Table Top Exercise* dapat dijelaskan melalui konsep komunikasi bencana. Menurut hasil penelitian Arisandi K dan Umam, komunikasi merupakan komponen penting dalam penanggulangan bencana. Dalam penanggulangan bencana, sistem komunikasi harus tersedia sebelum, saat bencana, dan pascabencana atau fase pemulihan pascabencana. Untuk menjalankan proses tersebut, sejumlah perlu pihak terlibat, antara lain pemerintah sebagai pusat koordinasi dan informasi, pihak swasta, LSM atau organisasi lain yang membantu pemerintah, media sebagai pihak yang membantu pemerintah dalam mengontrol arus informasi, dan masyarakat sebagai pihak yang menjalankan sistem tersebut (Arisandi K. & Umam, 2019)

Teori komunikasi Kottler, yang menekankan pada proses yang dimulai dari pengirim (*sender*), proses *encoding* (proses pengubahan pesan ke dalam bentuk simbolik, seperti teks, visual, atau audio), dan proses *decoding* (proses penguraian dan pengolahan pesan oleh penerima, yang terjadi ketika pesan diterima), sangat sesuai dengan model komunikasi bencana ini. Kottler mendefinisikan komunikasi sebagai aliran informasi antara pengirim dan penerima. pengirim, pengkodean (*encoding*), pesan, media/saluran komunikasi, penguraian pesan, penerima, reaksi umpan balik, dan gangguan (*noise*), yang menghalangi penyampaian pesan, adalah beberapa komponen penting dalam proses komunikasi (Kotler, 2000).

Dalam konsep komunikasi bencana, kolaborasi multipihak merupakan hal yang perlu disinergikan. Lima komponen atau pemangku kepentingan utama terlibat dalam gagasan menciptakan ekosistem inovasi untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan jangka panjang. Hal ini dikenal sebagai model sinergi pentahelix. Dengan demikian, dalam kerangka model sinergi pentahelix, kolaborasi antara pemerintah, komunitas bisnis atau dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat akan menghasilkan sinergi yang akan meningkatkan kesiapsiagaan bencana, meminimalkan kerugian, dan menurunkan risiko bencana (Pratama, et al, 2024)

Penelitian mengenai komunikasi bencana dengan metode *table top exercise* telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya, di antaranya oleh Lestari, et al pada tahun 2020 dan oleh Lestari, et al pada tahun 2019. Namun pada penelitian terdahulu belum ada yang membahas pada fase pemulihan pascabencana. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengembangkan model komunikasi bencana melalui *table top exercise* untuk menganalisis keterlibatan multipihak dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan pascabencana akibat gempa bumi di Cianjur tahun 2022. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan upaya pemulihan penghidupan masyarakat pascabencana di Kabupaten Cianjur yang dilakukan oleh multipihak. Melalui kegiatan *Table Top Exercise*, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan menjaring sebuah komitmen untuk peran serta keberlanjutan program - program pemulihan pascabencana yang telah diselenggarakan oleh unsur pentahelix.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 18 – 19 September 2024. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui FGD (*Focus Group Discussion*), studi pustaka dan observasi langsung. Tujuan utama dari metode FGD adalah untuk memperoleh data dari interaksi yang dihasilkan dari diskusi. Studi pustaka dilakukan melalui data sekunder yang diperoleh dari tempat kerja peneliti, BNPB, dan sumber-sumber lainnya. Sedangkan observasi langsung dilakukan pada saat acara berlangsung. Beberapa indikator yang diamati adalah mekanisme pelatihan pada setiap sesi, isu yang diangkat, kemampuan peserta dalam mengambil langkah dan kebijakan, informasi kebijakan penanggulangan bencana dari peserta, praktik baik penanggulangan bencana, serta proses penyusunan rekomendasi hasil diskusi.

Peserta FGD adalah dari multipihak sebagai pemangku kepentingan yaitu tim Kedeputan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, unsur pengarah BNPB, BPBD Kabupaten Cianjur, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Cianjur, Dinas Perumahan dan Permukiman Cianjur, Human Initiative, Ketua Senkom Mitra Polri, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), Humanitarian Forum Indonesia (HFI), Forum Lembaga Usaha Penanggulangan Bencana Indonesia (ForLUPBI), Palang Merah Indonesia (PMI), Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Kwarnas Pramuka, Perwakilan Relawan Penanggulangan Bencana. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis triangulasi data, di mana informasi yang dikumpulkan dari FGD dengan metode TTX dan observasi dibandingkan dan

diverifikasi untuk meningkatkan validitas serta reliabilitas hasil penelitian. Triangulasi ini membantu memastikan bahwa data yang diperoleh konsisten dan akurat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

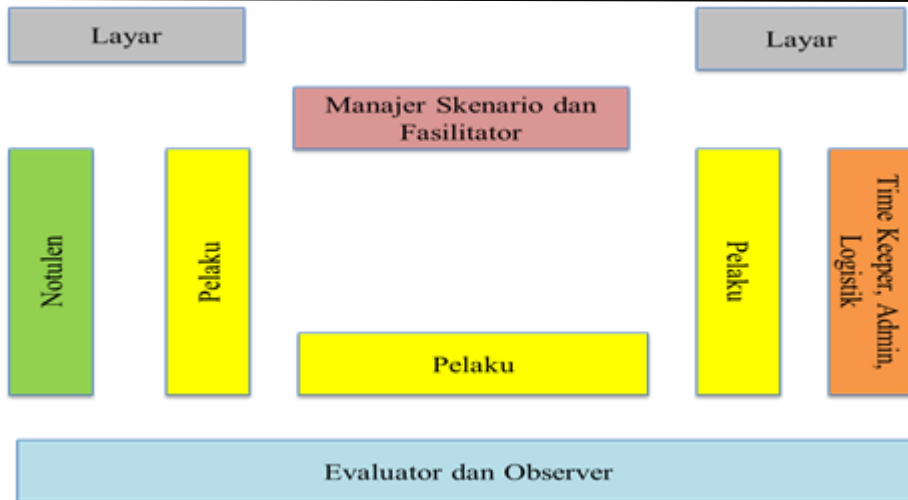
Kegiatan FGD dilaksanakan pada Rabu – Kamis, 18 – 19 September 2024 di D'Anaya Hotel Kota Bogor. Secara garis besar, kegiatan dibagi menjadi 3 sesi yaitu *Academic Session*, *Table Top Exercise*, dan *After Action Review (AAR)*. *Academic session* dilaksanakan dalam rangka persiapan dan pembekalan terkait konsep pelaksanaan *Table Top Exercise*. Adapun peran dan tanggung jawab multipihak yang terlibat dalam kegiatan *Table Top Exercise* disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Peran dan tanggung jawab dalam kegiatan *Table Top Exercise*

Elemen	Peran dan Tanggung Jawab
Manajer Skenario	Menyiapkan skenario latihan secara keseluruhan dan menyampaikannya kepada peserta, menyiapkan peta atau display lainnya yang diperlukan untuk mendukung skenario latihan
Fasilitator	Menyusun daftar pertanyaan, memastikan semua pelaku berperan dan menjawab pertanyaan secara profesional dan diskusi tidak menyimpang jauh dari konteks pembahasan
Pelaku	Memberikan tanggapan/ masukan sebagai pelaku mewakili instansi / institusi yang terkait, mengidentifikasi hal-hal yang perlu diangkat untuk dikoordinasikan lebih lanjut dengan organisasi/instansi atau pemangku kepentingan lainnya, mengidentifikasi rekomendasi untuk isu-isu yang harus diselesaikan, mengikuti aturan main yang ditetapkan oleh penyelenggara
Evaluator / AAR Notulen	Mencermati proses, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi Mencatat hasil diskusi, mengumpulkan masukan dari fasilitator dan evaluator
<i>Time keeper</i> , administrasi dan logistik	Memastikan kegiatan tepat waktu, mengingatkan fasilitator/narasumber mengenai waktu yang tersedia, mendukung kegiatan TTX dari sisi administrasi dan logistik
Pemantau / Observer	Memantau proses dan mencatat hal penting untuk menjadi masukan dan pembelajaran ke depannya

Sumber : (BNPB, 2017)

Adapun *layout* pelaksanaan kegiatan pada Gambar 1.



Gambar 1. Layout Kegiatan *Table Top Exercise* (Sumber: *Olahan Penulis, 2025*)

Adapun alur pelaksanaan dan hasil kegiatan *Table Top Exercise* dapat dilihat dalam Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Alur Pelaksanaan dan Hasil *Table Top Exercise*

No	Kegiatan yang Diobservasi	Hasil
1	Move 1. Penanganan Darurat Bencana, Status Darurat, Aktivasi Posko Darurat, Transisi Darurat ke Pemulihan	
a	Proses pembentukan/ Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB)	Proses pembentukan aktivasi SKPDB sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang SKPDB. Komandan dari pihak militer yang cepat saat respon untuk proses evakuasi dan penyelamatan. Akan tetapi terdapat klemahan kurangnya koordinasi dengan perangkat sipil lainnya terutama NGO sehingga optimalisasi pengerahan sumber daya yang ada dari unsur lain dalam pentahelix selain pemerintah agak terlambat. Perlu adanya peningkatan dalam komunikasi maupun koordinasi dari 5 unsur pentahelix dalam penanganan bencana di Kabupaten Cianjur
b	Pemahaman Multipihak terhadap Kaji Cepat/ Pendataan dalam Posko	Beberapa pihak atau <i>stake holder</i> yang terlibat dalam penanganan gempa Cianjur belum memahami fungsi dari posko komando yang dibentuk, hal ini mengakibatkan pengiriman bantuan yang kurang efektif dan tepat sasaran, hal tersebut dikarenakan pengerahan sumber daya dari <i>stake holder</i> ada yang tanpa koordinasi maupun merujuk data yang ada pada posko, dan perlunya sosialisasi dan pemahaman terhadap fungsi posko darurat
c	Pembentukan <i>Desk</i> Pemulihan	Perlunya transformasi kebijakan, khususnya dari Kementerian Dalam Negeri terkait aturan dalam penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dimungkinkan pada saat fase transisi darurat ke

pemulihan. Aturan saat ini, BTT hanya bisa digunakan pada saat tanggap darurat, padahal kebutuhan penanganan bencana di Kabupaten Cianjur masih banyak diperlukan pada saat transisi pemulihan. Pembentukan

Desk Pemulihan dirasa perlu pada saat transisi darurat ke pemulihan selain pada saat tanggap darurat, untuk dapat terus mengawal proses pemulihan sesuai dengan sektor yang terdampak (5 sektor pemulihan; perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi, lingkungan) baik setelah dilakukan *assesment* sampai dengan kewenangan dan tanggung jawab pembiayaan selanjutnya.

2 Move 2 Fase 1 : Aktivasi
Penyusunan Jitupasna-R3P/
Rencana Pemulihan dan Peran
Kemitraan

a. Penghitungan Kerusakan
Kerugian dan Kebutuhan
pemulihan pascabencana yang
melibatkan Kemitraan

Penghitungan kerusakan, kerugian dan kebutuhan pascabencana di Kabupaten Cianjur khususnya dalam sektor perumahan telah melibatkan beberapa pihak seperti PII (Persatuan Insinyur Indonesia) dan pihak akadmeisi, hal tersebut dapat mempercepat pendataan rumah rusak terdampak yang dilakukan, tentunya akan sangat efektif jika dapat dilakukan untuk pendataan sektor lainnya yang terdampak, tidak hanya dari lembaga pemerintah terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum namun juga pelibatan multipihak dari dunia usaha, swasta maupun NGO lainnya.

Dalam hal perhitungan kerusakan kerugian dan kebutuhan baiknya telah ada dan disepakati indikator maupun instrumen pengukuran yang digunakan dan merujuk pada satu kebijakan yang sama, sehingga hasil perhitungan yang dihasilkan akan mempunyai standar yang sama

b. Pemetaan Sumberdaya Mitra
(SDM, Sarana dan Prasarana,
Pendanaan

Dokumen R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana) yang telah disusun pemerintah daerah Kabupaten Cianjur telah memuat sektor-sektor terdampak berikut indentifikasi tanggung jawab kewenangan pembiayaannya, dengan total kebutuhan sebesar 4,5 trilyun, namun khusus untuk partisipasi lembaga usaha non pemerintah perlu diperjelas kembali pihak yang akan melakukan tanggung jawab tersebut, karena selama ini belum mencantumkan lembaga usaha tertentu yang akan mengawal kegiatan yang menjadi bagian tanggung jawab lembaga usaha

3. Move 2 Fase 2 : Aktivasi
Program Dan Kegiatan

Pemulihan Pascabencana Oleh Para Mitra

- | | | |
|----|---|--|
| a | Pelaksanaan Pemulihan berdasarkan perencanaan pemulihan | Hasil diskusi adalah pemahaman bersama, dan penyusunan kerangka kerja yang ditetapkan secara legal, sehingga jelas tanggung jawab dan kewenangan masing-masing pihak, seperti siapa berbuat apa, yang selanjutnya dituangkan dalam R3P |
| b. | Koordinasi dan Sinergi dengan para mitra | Perlunya koordinasi yang berkelanjutan terhadap implementasi rencana pemulihan Kabupaten Cianjur, melakukan pengawalan kegiatan terhadap rencana kegiatan beserta pengawalan tanggung jawab pembiayaan |

4. AAR (*After Action Review*)

- | | | |
|---|--|--|
| a | Monitoring Pelaksanaan Rencana Pemulihan | Perlunya monitoring berkala terhadap rencana pemulihan yang telah disusun dan dilakukan, saat ini monitoring hanya sebatas yang dilakukan pada sektor perumahan yang dananya berasal dari BNPB, sedangkan untuk sektor lain belum termonitoring, hal ini berakibat pada belum teridentifikasinya sektor2 lainnya yang masih perlu mendapatkan penanganan pascabencana, terlebih lagi dalam memantau komitmen2 pihak yang bertanggung jawab dalam proses pemulihan |
| b | Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemulihan | Hasil pelaksanaan monitoring yang dilakukan tentunya akan dijadikan bahan evaluasi selanjutnya, dimana kegiatan-kegiatan pemulihan yang tertuang dalam rencana pemulihan dan belum tertangani maka diperlukan tindaklanjut, memastikan kembali komitmen dan kewenangan yang telah tertuang dalam dokumen, memberikan pelaporan kepada pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat dapat segera menindaklanjuti sebelum masa R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana) selesai |

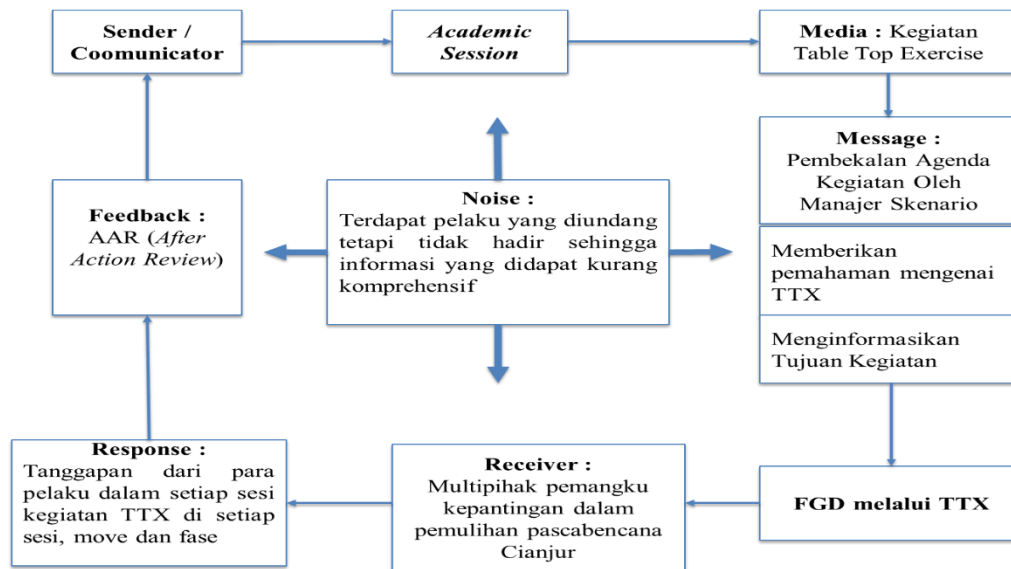
Sumber: Dokumen Penulis (2025)

Penyelenggara kegiatan sekaligus menjadi manager skenario dan fasilitator adalah BNPB. Adapun poin – poin hasil hasil FGD melalui *Table Top Exercise* diantaranya adalah perwakilan dari BPBD Cianjur menyatakan bahwa struktur organisasi SKPDB (Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana) telah melibatkan berbagai pihak, dan juga melibatkan pihak militer. Dalam hal pendistribusian bantuan, masih belum terdata secara baik sehingga bantuan belum merata, ada kelompok masyarakat yang menerima bantuan ganda, baik dari LSM atau NGO dan juga pemerintah. Perwakilan dari ForLUPBI (Forum Lembaga Usaha Penanggulangan Bencana Indonesia) menyatakan bahwa dunia usaha tidak terlibat langsung

dalam struktur SKPDB, tetapi tetap melakukan koordinasi dengan posko SKPDB dan menanyakan apa yang bisa dunia usaha lakukan dalam masa tanggap darurat. Dunia usaha banyak membuka posko terutama di kantor - kantor cabang perusahaan yang ada dilokasi bencana. Menurut ForLUPBI, dalam proses perhitungan kerusakan dan kerugian tiap perusahaan yang berfokus ke pascabencana memiliki form *assessment* tersendiri, dan data yang didapat dikonfirmasi dengan data hasil perhitungan Jitupasna (Kaji Kebutuhan Pasca Bencana) yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Perwakilan HFI (Humanitarian Forum Indonesia) menyatakan bahwa dalam masa tanggap melaksanakan *joint assesment* bersama dengan BNPB. ForLUPBI juga menyatakan bahwa pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi perlu dilakukan kajian lebih mendalam dan disesuaikan dengan konteks program pemulihan yang akan dikerjakan, serta diperlukan pembentukan klaster pemulihan beserta dengan regulasinya. BAZNAS dalam fase tanggap darurat Cianjur masuk ke dalam klaster logistik dengan kegiatan seperti pelayanan kesehatan dan penyediaan tempat ibadah sementara untuk para korban bencana. Sedangkan untuk program pemulihan pascabencana yang dilakukan BAZNAS di Cianjur adalah, membantu perbaikan rumah ibadah dan madrasah, dimana data *assessment* didapatkan dari Kementerian Agama. PMI melakukan *assessment* dan memberi bantuan untuk *livelihood*, pengembangan kapasitas PMI Lokal, air bersih dan sanitasi. PMI menggunakan data kerusakan dan kerugian pasca gempabumi cianjur menggunakan data dari Dinas PUPR. *Human Initiative* (HI) mensupport kolaborasi multipihak dalam fase pemukiman, mulai dari fase tanggap darurat sampai pascabencana. Organisasi ini berfokus pada pemulihan infrastruktur perumahan dan pemberdayaan masyarakat. MDMC lebih fokus pada pemulihan pascabencana sektor sosial, ekonomi dan lingkungan. Kegiatannya diantaranya adalah pembuatan klinik sehat di Kecamatan Cugenang, penghidupan kembali ekonomi masyarakat dengan pembangunan eduwisata dan perbaikan lingkungan dengan penanaman pohon. Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa kolaborasi multipihak ini perlu segera dibuatkan regulasi dan kebijanya, sehingga ketika terjadi kolaborasi dalam penanggulangan bencana bisa terwujud. Perwakilan Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi di BNPB menyatakan bahwa penyelenggaraan pemulihan pascabencana di Cianjur sektor perumahan dan infrastruktur untuk saat ini sudah baik, yang masih perlu ditingkatkan adalah adalah dari sektor sosial, ekonomi dan lintas sektor khususnya lingkungan, karena sektor tersebut belum maksimal dalam penanganannya. Perlu penguatan baik regulasi maupun program di 3 (tiga) sektor tersebut. Dalam penyusunan matriks

pendanaan dokumen R3P perlu untuk memasukkan keterlibatan lembaga usaha dengan menggunakan dana CSR.

Dari hasil FGD di atas, dapat dilihat bahwa penelitian ini menemukan model komunikasi bencana yang menggambarkan aspek komunikasi dan koordinasi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi guna pemulihan pascabencana gempa bumi Cianjur Tahun 2022 yang lalu. Hasil kegiatan *Table Top Exercise* kaitannya dengan model komunikasi bencana dapat digambarkan dalam Gambar 2.



Gambar 2. Model Komunikasi Bencana TTX Pemulihan pascabencana (Sumber: Olahan Penulis, 2025)

Hasil FGD melalui metode *Table Top Exercise* memberikan gambaran bagaimana keterlibatan multipihak dalam upaya pemulihan pascabencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Proses *Table Top Exercise* menjadi media dalam mengkomunikasikan serta mengevaluasi kegiatan pemulihan pascabencana yang dilakukan oleh. Hasil evaluasi tersebut sekaligus dapat menjadi masukan untuk *review* pelaksanaan R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana) gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Lestari, et al pada tahun 2019 bahwa model komunikasi kesiapsiagaan bencana erupsi Gunung Sinabung melalui gladi meja dinilai optimal. Komunikasi inilah yang perlu ditingkatkan saat terjadi bencana. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi berupa kebijakan untuk penyempurnaan Dokumen Rencana Kontinjensi sebagai Peraturan Bupati Karo. Peran komunikasi kebencanaan dalam rangka mitigasi dapat memberikan pedoman kepada masyarakat. Dalam tataran manfaat

komunikasi kebencanaan memiliki beberapa aspek yang dapat menginternalisasi masyarakat secara holistik. Hal tersebut diantaranya seperti dapat mengubah sikap (*to change the attitude*), dapat mengubah opini atau pendapat atau pandangan (*to changethe opinion*), dapat mengubah perilaku (*to change the behavior*), dan dapat mengubah masyarakat (*to change the society*) (Aziz,2023). Komunikasi dalam bencana dibutuhkan dalam setiap fase bencana. Selain informasi yang memadai tentang potensi bencana di suatu daerah, pelatihan dan internalisasi kebiasaan menghadapi situasi bencana juga harus dilakukan secara berkelanjutan. Cara menyampaikan informasi juga harus dilakukan dengan tepat. Kekeliruan dalam mengkomunikasikan sebuah informasi, bisa menimbulkan ketidakpastian yang memperburuk situasi (Rudianto, 2015).

Komunikasi yang efektif telah terbukti sangat penting untuk menurunkan risiko dan dampak bencana sebelum, selama, dan setelah bencana terjadi. Ketahanan masyarakat dapat ditingkatkan melalui strategi kesiapan, respons, pemulihan, dan mitigasi yang didukung oleh komunikasi yang terfokus dan inklusif. Inisiatif yang dapat meningkatkan kesiapan masyarakat dan menyebarkan pengetahuan antara lain melalui sosialisasi, simulasi kesiapsiagaan, dan penggunaan media sosial. Nilai komunikasi dalam penanggulangan bencana ditekankan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan penggunaan teknologi informasi mutakhir. Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih tangguh menghadapi bencana dan perubahan iklim, selain mitigasi jangka pendek (Tresnanti, et al, 2024).

Komunikasi saat bencana dan segera setelah situasi bencana adalah hal yang penting. Sistem komunikasi dan informasi yang andal dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat adalah kunci ketahanan komunitas (NIDM, 2015). Selain komunikasi, kolaborasi dan koordinasi juga merupakan aspek penting. Kolaborasi multipihak adalah bentuk kerja sama yang berlandaskan kesepakatan sukarela, saling membutuhkan, kebersamaan dan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan yang berasal dari berbagai spektrum institusi, baik pemerintah, sektor bisnis, masyarakat sipil dan LSM (NGO) dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan langsung dalam isu yang dikerjasamakan. Bentuknya dapat berupa kemitraan yang formal atau informal tergantung keberadaan, tipe dan isi klausul perjanjian kerjasama dan tipe kelembagaan yang diputuskan bersama. Kolaborasi multipihak merupakan bentuk kerjasama dimana seluruh pemangku kepentingan menanggung risiko secara bersama-sama dan menggabungkan sumber daya manusia, finansial, pengetahuan dan

pengalaman yang dimiliki untuk memaksimalkan potensi dalam mencapai tujuan bersama, baik di tataran global, regional, nasional dan lokal (Bappenas, 2019)

Dalam penanggulangan bencana juga diperlukan kolaborasi yang solid antar unsur. Pentahelix berfokus pada kerja sama 5 komponen utama yaitu pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media. Setiap unsur memiliki peran masing-masing dalam kolaborasi pentahelix kebencanaan, seperti pihak pemerintah yang berperan sebagai regulator, akademisi mempunyai peran sebagai konsep dan inovasi, masyarakat sebagai akselerator, media massa berperan untuk diseminasi, dan dunia usaha sebagai pendorong (Haksama, et al. 2023). Kolaborasi menuntut adanya kesadaran kolektif dan kesetaraan fungsi dalam bekerja sama. Pendekatan kolaborasi pentahelix dalam pengurangan risiko bencana bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih efektif dan efisien melalui kerangka kebijakan, peraturan, struktur, mekanisme, program, dan kegiatan yang meyakinkan dan koheren, serta akuntabel. Pendekatan pentahelix dapat memfasilitasi proses kerja sama berdasarkan pengetahuan, kompetensi, dan pengalaman kolektif, membangun kepercayaan dan keyakinan di antara para pelaku, dan jalan keluar yang saling menguntungkan khususnya dalam pengurangan risiko bencana (Pujiono Center, 2022).

Kementerian PUPR menyatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama penyelenggara pemerintahan Indonesia dan masyarakat. Sinergi, koordinasi, dan kolaborasi dengan institusi Pemerintah, Pemerintah Daerah serta masyarakat menjadi faktor kunci berhasilnya upaya mitigasi bencana (Kementerian PUPR, 2022). Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Arbianti tahun 2024 yang menunjukkan menunjukkan bahwa di Kota Binjai, kolaborasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana banjir berjalan cukup efektif, dan upaya gabungan dari berbagai lembaga tersebut telah memberikan hasil yang signifikan dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh bencana alam. BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Kepolisian, Bank Rakyat Indonesia, dan masyarakat setempat berkolaborasi lintas instansi untuk mengelola bencana banjir di Kota Binjai. Dalam kerja sama ini, lembaga-lembaga terkait bekerja sama menggunakan media massa dan kampanye sosialisasi untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai bahaya banjir, strategi mitigasi, dan protokol evakuasi. Namun kolaborasi ini terhambat oleh kurangnya dana, keahlian, dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan (Arbianti, 2024).

Khaifan pada tahun 2023 melaksanakan penelitian yang mengeksplorasi peran tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan bencana di Indonesia dalam setiap fase bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua fase bencana memerlukan koordinasi antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Pada fase prabencana memungkinkan tata kelola kolaboratif untuk mewujudkan masyarakat tangguh bencana, sedangkan pada saat fase pascabencana dilakukan dengan menerapkan pendekatan pemulihan berbasis komunitas dan kerjasama dalam pengelolaan bantuan terhadap masyarakat terdampak bencana. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat kolaborasi adalah lemahnya koordinasi dan kepemimpinan (Khafian, 2023).

Dalam penelitian ini teridentifikasi bahwa upaya pemulihan pascabencana gempabumi di Cianjur sudah dilaksanakan oleh berbagai pihak, akan tetapi masih belum terkoordinir dan terintegrasi. Hasil penelitian ini didukung juga oleh hasil penelitian Ramada yang menemukan bahwa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Cianjur sudah berjalan baik tetapi belum terintegrasi. Pemulihan setelah terjadi bencana membutuhkan tindakan yang terkoordinasi, seperti pemberdayaan masyarakat yang berjangka panjang dan berhasil memulihkan kondisi masyarakat. Untuk meningkatkan ketahanan masyarakat, inisiatif yang dilakukan adalah membangun kembali dan memulihkan infrastruktur, meningkatkan kapasitas ekonomi, memberikan pelatihan manajemen bencana, menyediakan saluran komunikasi, serta melakukan pemantauan dan penilaian. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat setempat harus terlibat dalam fase implementasi pemberdayaan masyarakat pascabencana. Diharapkan bahwa tindakan-tindakan ini akan membantu masyarakat Kabupaten Cianjur dalam membangun kembali ketangguhan mereka dan pulih dari dampak bencana. Kolaborasi yang erat, koordinasi yang efektif, peningkatan kapasitas masyarakat, dan alokasi dana yang memadai sangat diperlukan agar program ini berhasil. Diharapkan masyarakat Kabupaten Cianjur akan lebih tangguh menghadapi bencana di masa depan dengan menerapkan program pemberdayaan masyarakat yang efektif, efisien dan berkelanjutan (Ramada,2024).

D. KESIMPULAN

Penelitian menyimpulkan bahwa *table top exercise* dapat menjadi metode dalam komunikasi bencana tidak hanya dalam fase pra bencana dan tanggap darurat, tetapi juga pada fase pascabencana. Dengan melaksanakan *Focus Group Discussion* melibatkan unsur pentahelix yang terlibat dalam pemulihan pascabencana gempabumi Cianjur Tahun 2022, didapatkan hasil bahwa banyak pihak yang berkontribusi dalam upaya pemulihan

pascabencana sesuai dengan bidang dan kapasitas masing – masing pihak, akan tetapi upaya tersebut belum terintegrasi karena masih kolaborasi multipihak khususnya pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi belum dilaksanakan secara optimal. Dalam fase pascabencana, kolaaborasi multipihak dapat dimulai dengan pelibatan dan identifikasi seluruh pihak sesuai dengan peran dan sumberdaya dalam pemulihan pascabencana, dimulai dari tahap perencanaan penyusunan dokumen rencana rehabilitasi rekonstruksi pascabencana (R3P).

Dengan melibatkan semua pihak dalam penyusunan dokuemn R3P tersebut, diharapkan dapat terbentuk komitmen setiap pihak dalam unsur pentahelix untuk melaksanakan program kegiatan pemulihan pascabencana serta menjamin adanya keberlanjutan sehingga masyarakat terdampak pulih. Rekomendasi dan tindak lanjut dari penelitian ini adalah sosialisasi terhadap regulasi penyelenggaraan rehabilitasi rekonstruksi termasuk penyusunan dokumen R3P sebagai dasar dalam pelaksanaan pemulihan di wilayah pascabencana terhadap para pihak atau usnur pentehlix. Selain itu, dapat dibentuk suatu forum untuk mewadahi pihak-pihak yang memiliki antusias dan program kegiatan terutama dalam hal pemulihan pascabencana di wilayah terdampak bencana sehingga bisa dilakukan pemetaan sumberdaya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Arbianti,Siti.(2024). *Kolaborasi Antar Lembaga dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Binjai*.(Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh).
- Aziz, Muhammad Hilmy.(2023). Komunikasi Kebencanaan : Peran dan Manfaat pada Mitigasi. *Communications*. Vol.5 (1), hal : 301–16.doi: 10.21009/communications.5.1.2.
- Bappenas.(2019).*Panduan Kemitraan Multipihak untuk Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta : Kementerian PPN/Bappenas.
- BNPB.(2017).*Perancangan Latihan Geladi Ruang/Table Top Exercise (TTX) Diklat Perancangan Latihan Penanggulangan Bencana Edisi I*. Jakarta : Pusdiklat BNPB.
- BPBD Cianjur.(2023). *Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur*. Cianjur: BPBD Kabupaten Cianjur.
- Dwiningtias, Hamidah & Raharjo, Didik H. 2024. “Komunikasi Bencana dalam menanggulangi Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur.” *Ikon --Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* Vo.29 (1), hal :51–59. doi: 10.37817/ikon.v29i1.3736.
- Haksama, Setya, et al. (2023). Peningkatan Peran Kolaborasi Pentahelix Dalam Upaya Kesiapsiagaan Mengenai Bencana Multihazard Di Kabupaten Banyuwangi. *Journal of*

Community Empowerment and Innovation Vol 1(3), hal:101–14. doi: 10.47668/join.v1i3.660.

- Hartini, K.S, et al.(2022). *Penanganan Gempa Cianjur Jakarta* : Kementerian PUPR
- K, Fetty Arisandi, & Umam C.(2019). Komunikasi Bencana Sebagai Sebuah Sistem Penanganan Bencana Di Indonesia. *Mediakom : Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol3(1), hal :25–37. doi: 10.35760/mkm.2019.v3i1.1980.
- Khafian, Nidaan.(2023). The Role Of Collaborative Governance In Indonesian Disaster Management. *Journal of Governance and Administrative Reform*. Vol 4(2), hal :158–75. doi: 10.20473/jgar.v4i2.53367.
- Kotler, Philip.(2000). *Marketing Management, Millenium Edition*. Boston : Perason Custom Publishing.
- Lestari, Puji, et al. (2019). “Table Top Exercise Disaster Communication Model in Reducing Disaster Risk.” *Jurnal Penelitian Komunikasi* 22(1):17–30. doi: 10.20422/jpk.v22i1.587.
- Lestari, Puji, et al.(2020). “Disaster Communication Uses Field Training Exercise Simulation as an Important Aspect of Disaster Risk Reduction.” *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, Vol 36 (1), hal ::166–86. doi: 10.17576/JKMJC-2020-3601-10.
- NIDM.(2015). *Disaster Communication*.New Delhi : EAS ERR
- Pasaribu, Lina, et al (2023). Kolaborasi Penta Helix Dalam Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi. *Share : Social Work Journal*. Vol 13(1), hal:140-149. doi: 10.24198/share.v13i1.47909.
- Pratama, J.P., et al. (2024). Jurnal Sinergitas Pentahelix dalam PRB di Indonesia. *Journal of Current Research in Disaster Response and Emergency Management*, Vol.1(1), hal:1-6.
- Putra, A. Setyabawana, & Fauzy, A.(2024). Asean Regional Disaster Response Simulation Exercise (ARDEX) 2023: (Case Study: Bantul Earthquake, DIY) dalam *Proceedings of the International Conference on Multidisciplinary Studies (ICoMSi 2023)*. Vol. 829 (hlm 123-132), *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. Paris: Atlantis Press SARL.
- Ramada, Andro. (2024). Tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi: Studi kasus gempa Cianjur. *Information, Communications, and Disaster*. Vol. 1(1). doi: 10.61511/icd.v1i1.2024.447.

Rudianto.(2015).Komunikasi dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Simbolika*.Vol.1(1),
hal:51-61

Sari, Intan Permata, et al (2023). “Enhancing Disaster Resilience: Evaluating the Implementation of an Early Warning System through Table Top Exercises.” *PERSPEKTIF*. Vol 12(4), hal:1253–60. doi: 10.31289/perspektif.v12i4.10341.

SIAP SIAGA. (2022). *Kajian Kolaborasi Pentehlix Dalam Pengelolaan Risiko Bencana di Indonesia*.Yogyakarta : Pujiono Center.

Tresnanti, Desratri Timur, dkk.(2024). Komunikasi Bencana Sebagai Sistem Mitigasi Bencana Hidrometeorologi Akibat Perubahan Iklim di Jakarta.*PENDIPA Journal of Science Education*.Vol.8(2), hal : 155 - 163.